

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
GOOD GOVERNANCE DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
TRIYOGI WISUDANTI
31402400126**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
GOOD GOVERNANCE DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**



**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**

**Disusun Oleh :
TRIYOGI WISUDANTI
31402400126**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Disusun Oleh:

Triyogi Wisudanti

NIM: 31402400126

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 01 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Maya Indriastuti., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP

NIK. 211406021

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
GOOD GOVERNANCE DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

Disusun Oleh :

Triyogi Wisudanti

NIM : 31402400126

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 03 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Maya Indriastuti., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP

NIK. 21.1406021

Penguji



Digitally signed
July 14, 2025

Sri Sulistyowati., S.E., M.Si., CIISA

NIK. 21.1403017

Usulan penelitian untuk skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 03 Juni 2025

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti., S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD

NIK. 21.1403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triyogi Wisudanti

NIM : 31402400126

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil jiplakan, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang,

Yang membuat pernyataan



Triyogi Wisudanti

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES”**. Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Maya Indriastuti., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.

5. Keluarga terutama Ibu Nurwati, Bapak Ro'is (alm), kakak Anggita Ujianti dan Indra Tralanta, adik M.Zamrud Nusantara, suami Ermon Nova, anak Vania Ananda Putri dan Raditya Arkhan Rasyafariq yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara dan teman-teman terdekat yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun sehingga bisa menjadi perbaikan didalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 08 Mei 2025

Peneliti,



Triyogi Wisudanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan.....	9
2.2 Variabel Penelitian	10
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	10
2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.2.3 <i>Good Governance</i>	11
2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	11
2.3 Penelitian Terdahulu.....	12
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	16
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	16
2.4.2 Pengembangan Hipotesis	17
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Populasi dan Sampel	21
3.3 Sumber dan Jenis Data	22

3.4	Metode Pengumpulan Data	22
3.5	Variabel dan Indikator	22
3.6	Teknik Analisis Data	27
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	27
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	28
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	28
BAB IV		31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	31
4.2	Deskripsi Variabel	34
4.2.1	Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	36
4.2.2	Deskripsi Variabel <i>Good Governance</i> (X2)	37
4.2.3	Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	38
4.2.4	Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	39
4.3	Statistik Deskriptif	39
4.4	Analisis Instrumen	41
4.4.1.	Uji Validitas	41
4.4.2.	Uji Reliabilitas	42
4.5	Asumsi Klasik	43
4.5.1.	Uji Normalitas	43
4.5.2.	Uji Multikolinearitas	44
4.5.3.	Uji Heteroskedastisitas	45
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.7	Hasil Uji Kelayakan Model	48
4.7.1	Uji F	48
4.7.2	Uji Koefisien Determinasi	49
4.8	Uji Hipotesis (Statistik t)	49
4.9	Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.9.1	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	51
4.9.2	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	52
4.9.3	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	52

BAB V	54
PENUTUP	54
5.1 Simpulan.....	54
5.2 Implikasi	55
5.3 Keterbatasan Penelitian	56
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten Brebes.....	2
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian terdahulu	12
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator	22
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Penelitian.....	31
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	32
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	34
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden pada Variabel SAP	36
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Pada Variabel Good Governance	37
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Pada Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	38
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan....	39
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi linier Berganda	46
Tabel 4. 17 Hasil uji F.....	48
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 4. 19 Hasil Uji t.....	50

DAFTAR GAMBAR

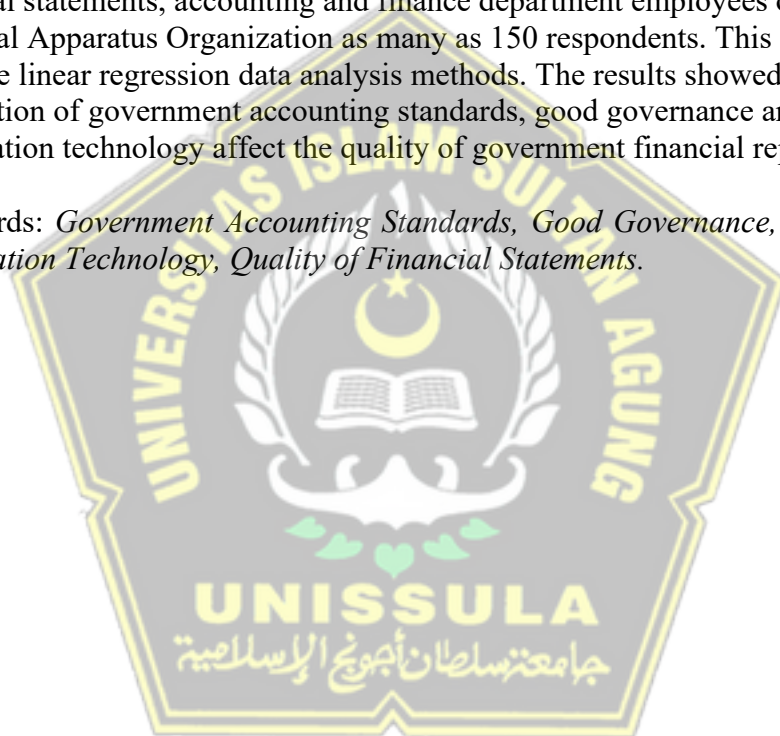
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	17
---	----



ABSTRACT

The quality of financial statements is government accountability and output that shows performance during the current period. This study aims to analyze the effect of the application of government accounting standards, good governance and the use of information technology on the quality of financial reports of the Brebes district government. This research is quantitative research with primary data sources in the form of questionnaires. The population in this study were employees at the Brebes Regency Regional Apparatus Organization. Sampling was carried out using purposive sampling technique, namely the staff compiling financial statements, accounting and finance department employees of each Regional Apparatus Organization as many as 150 respondents. This study uses multiple linear regression data analysis methods. The results showed that the application of government accounting standards, good governance and the use of information technology affect the quality of government financial reports.

Keywords: *Government Accounting Standards, Good Governance, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Statements.*



ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah dan output yang menunjukkan kinerja selama periode berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu staf penyusun laporan keuangan, pegawai bagian akuntansi dan keuangan tiap Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 150 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting dalam menilai kinerja keuangan suatu organisasi, termasuk dalam sektor pemerintahan. Bagi instansi pemerintah, dalam satu tahun anggaran pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ([Dariana, D., & Oktavia, 2018](#)). Sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil operasional pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan menjadi ukuran utama untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan sebagai sarana akuntabilitas publik yang dapat mencerminkan transparansi, efektivitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Brebes memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut – turut yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten Brebes
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Opini LKPD Kabupaten Brebes
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Tahun 2019 - 2023*

Dalam penyajian Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi, dan evaluasi kinerja (Pebriani, 2019). Menurut (Aminy et al., 2021) pengelolaan keuangan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola keuangan dengan baik dan benar. Selain itu kualitas LKPD dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi (PTI), karena membuka akses bagi publik dalam mendapatkan dan menggunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat (Eki & Hartawati, 2020)

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normative agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No.71, 2010). Menurut [\(Aminy et al., 2021\)](#) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik pengguna maupun penyusun laporan keuangan dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian [\(Nur Setyarini & Ambarwati, 2024\)](#) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian [\(Handayani, 2012\)](#) yang menyatakan sebaliknya.

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara (state), sektor swasta, dan masyarakat (society) [\(RI, 2004\)](#). Penerapan *Good Governance* memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kualitas laporan keuangan daerah. Beberapa penelitian mendukung hal ini seperti penelitian [\(Rahmadani & Zulaika, 2023\)](#) yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat *good governance*, maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian [\(Advia et al., 2023\)](#) bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas keuangan daerah. Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh ([Ariyanti et al., 2023](#)) yang mengatakan bahwa penerapan *good governance* tidak berpengaruh dalam penilaian kualitasnya laporan keuangan daerah, maksudnya adalah tata kelola pemerintahan tersebut sudah bagus namun bukan menjadi tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan penelitian ([Aminy et al., 2021](#)) menyatakan bahwa *good governance* tidak mempengaruhi kualitas keuangan daerah.

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pengolahan data. Kegiatan tersebut termasuk didalamnya mendapatkan, memasukkan, memproses, menata, mengarsipkan, dan memanipulasi data dalam menciptakan suatu informasi yang berkualitas ([Uno, H. H. B., & Lamatenggo, 2011](#)). Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dapat diukur melalui penggunaan hardware, software dan brainware serta jaringan dan komunikasi ([Pravasanti, Y.A, Ningsih, 2016](#)). Pengembangan dan pemanfaatan IT wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah ketika melakukan kegiatan pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi keuangan kepada publik ([Presiden, 2010](#)). Hasil penelitian ([Mirnawati et al., 2021](#)) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PTI dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sehingga menghasilkan KLIK yang baik serta dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Sejalan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ([Ridzal et al., 2022](#)), ([Purba & Purba, 2023](#)),

[\(Rahayu & Kanita, 2023\)](#). Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [\(Nur Setyarini & Ambarwati, 2024\)](#) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PTI) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Penelitian [\(Junyantara & Putra, 2021\)](#) juga menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. Hal ini menyatakan bahwa tanpa memiliki pengetahuan teknologi informasi maupun mengikuti perkembangan teknologi masih dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian [\(Tabupook, A.A, 2024\)](#) dengan perbedaan pertama yaitu penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) sebagai variabel independen, variabel ini diambil dari penelitian [\(Luthfya et al., 2024\)](#). Penulis menambahkan satu variabel tersebut untuk menguji hubungan antara standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [\(Nur Setyarini & Ambarwati, 2024\)](#) dan penelitian [\(Junyantara & Putra, 2021\)](#). Kedua, objek penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah sedangkan penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes dikarenakan penulis akan mengidentifikasi secara spesifik bagaimana kombinasi dan implementasi dari ketiga variabel independen berkontribusi pada kualitas laporan keuangan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten

Brebes mempunyai kualitas laporan keuangan yang baik, hal ini terbukti dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut – turut yaitu dari tahun 2019 – 2023. Dengan status WTP yang diperoleh selama lima tahun berturut - turut ini menjadi dasar untuk dilakukan identifikasi faktor pendukung utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Brebes. Penulis tertarik mengambil penelitian ini dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil penelitian dengan penelitian – penelitian terdahulu salah satunya penelitian oleh [\(Junyantara & Putra, 2021\)](#) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Denpasar. [\(Nur Setyarini & Ambarwati, 2024\)](#) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “ *Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes?

2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian dijelaskan untuk menguji :

1. Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pengaruh standar akuntansi pemerintahan, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Masyarakat, sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kualitas informasi atas laporan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut [\(Jensen & Meckling, 1976\)](#) hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal serta memberi kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan memiliki prinsip utama yaitu hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”.

Laporan keuangan digunakan pemerintah sebagai agen yang memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang menguntungkan bagi pengguna laporan keuangan dan masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah dan membantu pengambilan keputusan, baik politik, sosial, maupun ekonomi secara langsung atau melalui wakilnya [\(SUMARYATI et al., 2020\)](#).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut [\(Munawir, 1991\)](#) laporan keuangan adalah hasil dari sebuah proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut yaitu (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; (4) dapat dipahami.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. SAP dapat dikatakan merupakan suatu syarat berkekuatan hukum dalam usaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia [\(Pujanira, 2017\)](#). Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara yang memerintahkan supaya bentuk dan isi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.2.3 *Good Governance*

Good Governance merupakan suatu konsep yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan ([Khadijah, Juniarti, 2025](#)). Sementara menurut ([Junyantara & Putra, 2021](#)) tata kelola pemerintah yang baik yaitu tata kelola yang dilakukan secara transparan dari proses penyusunan laporan keuangan, proses pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang disusun.

United Nations Development Program ([UNDP, 1997](#)) mendefinisikan *Good Governance* pada dokumen yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*” sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan integritas dalam masyarakat. Istilah ini sering disebut dengan pemerintahan yang baik.

2.2.4 *Pemanfaatan Teknologi Informasi*

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pengolahan data. Kegiatan tersebut termasuk didalamnya mendapatkan, memasukkan, memproses, menata, mengarsipkan, dan memanipulasi data dalam menciptakan suatu informasi yang berkualitas ([Uno, H. H. B., & Lamatenggo, 2011](#)). Teknologi informasi dapat juga dikatakan

sebagai pengetahuan di bidang informasi yang berbasis komputerisasi, dimana kemajuannya berkembang dengan pesat ([Lantip, 2011](#)).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dapat diukur melalui penggunaan hardware, software dan brainware serta jaringan dan komunikasi ([Pravasanti. Y.A, Ningsih, 2016](#)). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi maka dapat dijabarkan sebagai suatu teknik untuk menghimpun, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menyelidiki dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu pengembangan dan pemanfaatan IT wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Ketika melakukan kegiatan pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi keuangan kepada publik ([Presiden, 2010](#)).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul Penelitian	Variabel, Sampel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Alvi angelica tabupook,ika wulandari (2024) Pengaruh penerapan SAP dan <i>Good Governance</i>	Variabel independen : X1= SAP X2= <i>Good Governance</i> Variabel Dependen : Y= Kualitas laporan Keuangan	SAP dan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas

	terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Sampel : Pegawai BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Alat Analisis : Regresi Linier Berganda	Laporan Keuangan
2	Robi Maulana (2021) Pengaruh penerapan SAP, SPI dan PTI terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating	Variabel independen : X1= SAP X2= SPI X3= <i>Good Governance</i> Variabel Dependen : Y= Kualitas Laporan Keuangan Sampel : 32 OPD pada Kab. Majalengka Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Jika SAP, SPI dan Good Governance baik maka Kualitas Laporan Keuangan juga baik dan sebaliknya. SAP, SPI dan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadappoa Kualitas Laporan Keuangan
3	Dwi Oktafia Ariyanti, Wiwik Fitria Ningsih, Dra. Ratih Rahmawati (2023) Pengaruh implementasi SAP, <i>Good Governance</i> , Akuntabilitas dan Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Variabel Independen: X1=SAP X2= <i>Good Governance</i> X3=Akuntabilitas X4=Transparansi Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan Sampel: 60 Pegawai pada BKAD Kab. Situbondo Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	SAP, <i>Good Governance</i> , Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

4	Putri Dewi Rahmadani, Nurfitri Zulaikha (2023) Pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM dan <i>Good Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan	<p>Variabel Independen: X1=SAP X2=Kompetensi SDM X3=<i>Good Governance</i></p> <p>Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Moderating: Z=SPI</p> <p>Sampel: 123 Pegawai pada SKPD Kepulauan Riau</p> <p>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda</p>	SAP, kompetensi SDM, <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Dimana interaksi SPI dengan SAP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
5	Mirawati, Ema Nirwana, Decky Herndarsyah (2020) Determinan kualitas laporan keuangan satuan organisasi perangkat daerah	<p>Variabel Independen: X1=Kompetensi Staf Akuntansi (KSA) X2=SAP X3=SPI X4=Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)</p> <p>Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Sampel: 153 Pegawai pada OPD Kab. Bengkalis</p> <p>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda</p>	KSA, SAP, SPI dan PTI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
6	Raibbatol Advia, Agus Satrya Wibowo, M.Ichsan Diarsyad (2022) Pengaruh penerapan SAP, kompetensi aparatur pemerintah	<p>Variabel Independen: X1=SAP X2=Kompetensi Aparatur Daerah X3=<i>Good Governance</i></p> <p>Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Sampel: 72 Pegawai pada Dinas Kota Palangka raya</p> <p>Alat Analisis: Regresi linier Berganda</p>	SAP, Kompetensi Aparatur Daerah dan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

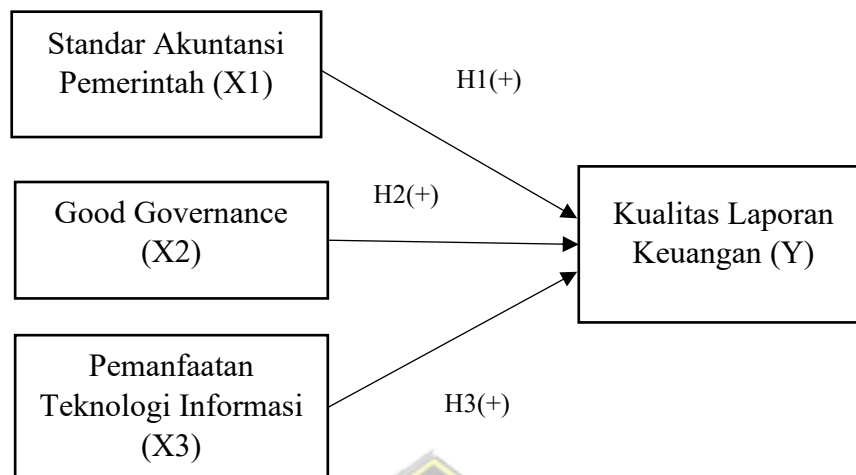
	daerah dan <i>Good Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan daerah		
7	Nining Asniar Ridzal, I Wayan Sujana, Ernawati Malik (2022) Pengaruh kapasitas SDM, PTI dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Buton Selatan	Variabel Independen: X1=Kapasitas SDM X2=PTI X3=SPI Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan Sampel : Pegawai bagian keuangan pada 33 dinas di kabupaten Buton Selatan Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Kapasitas SDM, PTI dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
8	Sahala Purba, Rasdianta Purba (2023) Determinasi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Varibel Independen: X1=Pengetahuan Akuntansi X2=SPI X3=PTI X4=Fungsi Internal Audit Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan Sampel : 69 Pegawai pada OPD Kab. Deli Serdang Alat Analisis; Regresi Linier Berganda	Pengetahuan Akuntansi, SPI, PTI dan Fungsi Internal Audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
9	Sri Rahayu, Alfanisha Dewi Kanita (2022) Pengaruh penerapan SAKD, PTI dan SPI terhadap kualitas laporan	Variabel Independen: X1=SAKD X=PTI X3=SPI Variabel Dependen: Y=Kualitas Laporan Keuangan Sampel:84 Pegawai pada OPD DKI Jakarta	SAKD, PTI dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

	keuangan daerah	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	
10	Ade Luthfya, Sri Rahayu, Rita Friyani (2021) Pengaruh SAP, SPI dan <i>Good Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel Independen: $X_1 = \text{SAP}$ $X_2 = \text{SPI}$ $X_3 = \text{PTI}$ Variabel Moderating: $Z = \text{Komitmen Organisasi}$ Variabel Dependen: $Y = \text{Kualitas Laporan Keuangan}$ Sampel: 93 pegawai keuangan pada OPD Provinsi Jambi Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	SAP, SPI dan PTI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai moderator

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis merupakan gambaran hubungan antar variabel – variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Laporan Keuangan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan urutan mekanisme, pelaksana, perangkat, dan elemen lain yang sistematis dalam merealisasikan peran akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah ([Presiden, 2010](#)). Pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang sangat diperlukan untuk lingkungan pemerintahan, tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan namun LKPD yang baik akan dimanfaatkan oleh khalayak umum sebagai landasan dalam pengambilan keputusan akuntansi yang melibatkan pemerintah di dalamnya.

Berdasarkan teori agensi, dimana dalam teori agensi terdapat *bonding cost* yaitu biaya yang ditanggung agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal. Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme *bonding cost* karena membutuhkan adanya suatu aturan atau patokan dalam pemerintah agar agen menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan principal.

Penelitian yang dilakukan [\(Rahmadani & Zulaika, 2023\)](#) menyatakan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dengan baik maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sesuai dengan tujuan dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.2.2 Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good Governance merupakan suatu konsep yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan [\(Khadijah, Juniarti, 2025\)](#). [\(Junyantara & Putra, 2021\)](#) tata kelola pemerintah yang baik yaitu tata kelola

yang dilakukan secara transparan dari proses penyusunan laporan keuangan, proses pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang disusun.

Hubungan *good governance* dengan kualitas laporan keuangan pemerintah didasarkan pada teori agensi, dimana dengan adanya *good governance* maka pemerintah yang bertindak sebagai agen diberi kewenangan oleh masyarakat sebagai principal diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik dan terbuka oleh publik, dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintahan daerah dengan para pengguna informasi keuangan pemerintah (*principal*) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Rahmadani & Zulaika, 2023](#)) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat *good governance*, maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pengolahan data. Kegiatan tersebut termasuk didalamnya mendapatkan, memasukkan, memproses, menata, mengarsipkan, dan memanipulasi data dalam

menciptakan suatu informasi yang berkualitas ([Uno, H. H. B., & Lamatenggo, 2011](#)). Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dapat diukur melalui penggunaan *hardware*, *software* dan *brainware* serta jaringan dan komunikasi ([Pravasanti. Y.A, Ningsih, 2016](#)).

Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah menurut teori keagenan, pihak agen atau pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya secara maksimal dengan menggunakan teknologi informasi yang ada untuk menunjang membentuk informasi finansial yang berkualitas dan pelaporan secara tepat waktu kepada pihak *principal*. Pengembangan dan pemanfaatan IT wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah ketika melakukan kegiatan pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi keuangan kepada publik ([Presiden, 2010](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh ([Buchori, 2023](#)), menyatakan semakin tinggi Pemanfaatan Teknologi Informasi, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel melalui pengolahan data numerik yang diperoleh dari kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang sesuai untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik akuntansi sektor publik.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi ialah ketentuan daerah yang luas disertai adanya objek dan subjek dengan kualitas dan kriteria yang dapat ditetapkan oleh peneliti kemudian didapatkan suatu data untuk diolah dan disimpulkan hasilnya ([Sugiyono, 2017](#)). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Brebes.

Menurut ([Sugiyono, 2017](#)) dalam penelitian kuantitatif, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu staf penyusun laporan keuangan, pegawai bagian keuangan dan

staf bidang akuntansi tiap Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 150 responden.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian (Akademia.co.id, 2024). Dalam penelitian ini, data primer menggunakan instrumen berupa kuesioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami pengukuran variabel serta apa yang dapat diharapkan dari responden.

3.5 Variabel dan Indikator

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

No	Variabel dan Definisi Operasional	Indikator	Item Pertanyaan
1	Y = Kualitas laporan keuangan Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa “Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan	1) Relevansi laporan keuangan 2) Keandalan laporan keuangan; 3) Dapat dipahami; 4) Dapat dibandingkan.	1) Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara tepat waktu sehingga berguna dalam rangka pengambilan keputusan. 2.1) Laporan keuangan pemerintah daerah serta informasi dalam laporan keuangan

	<p>dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 01 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kaulitatif.</p>		<p>disajikan secara lengkap.</p> <p>2.2) Laporan keuangan pemerintah daerah serta informasi dalam laporan keuangan bersifat netral tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu dan menyajikan transaksi serta peristiwa secara jujur.</p> <p>3.1) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna.</p> <p>3.2) Catatan atas laporan keuangan (CaLK) pemerintah daerah memberikan penjelasan yang memadai untuk menghindari salah tafsir.</p> <p>4) Laporan keuangan pemerintah daerah secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya.</p>
2	<p>X1= Standar akuntansi pemerintahan</p> <p>Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah prinsip dari akuntansi yang diterapkan dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Jadi SAP dapat</p>	<p>1) Penerapan SAP berbasis akrual</p> <p>2) Kepatuhan terhadap PSAP</p> <p>3) Pemahaman terhadap SAP</p>	<p>1) Pemerintah daerah telah konsisten menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.</p>

	<p>dikatakan merupakan suatu syarat berkekuatan hukum dalam usaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia (Pujanira, 2017).</p>	<p>2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berlaku.</p> <p>3) Staf / pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pemahaman yang mendalam tentang SAP.</p> <p>4) Staf/pegawai memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menjalankan standar akuntansi yang ditetapkan.</p> <p>5) Pelatihan mengenai SAP dilakukan secara rutin kepada staf/pegawai yang terkait di unit kerja kami.</p>
3	<p>X2= <i>Good Governance</i></p> <p><i>Governance</i> diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. Mardiasmo (2009 : 17)</p>	<p>1) Transparansi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah</p> <p>2) Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan</p> <p>3) Penegakkan Hukum</p> <p>4) Partisipasi public dalam proses penganggaran dan pelaporan</p> <p>1.1) Publik dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan pemerintah daerah.</p> <p>1.2) Publik dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan pemerintah daerah.</p>

	<p>Dapat dikatakan bahwa <i>good governance</i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan <i>legal political frame work</i> bagi tumbuhnya aktifitas usaha.</p>		<p>2.1) Pejabat pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilaksanakan.</p> <p>2.2) Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai alat untuk menilai pertanggungjawaban pengelolaan dana/sumber daya keuangan kepada publik.</p> <p>3) Terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4.1) Dalam proses perencanaan anggaran pemerintah daerah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>4.2) Terdapat wadah bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.</p>
4	<p>X3= Pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>teknologi informasi adalah suatu teknologi</p>	<p>1) Penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah (misalnya: SIMDA, SIPD)</p>	<p>1) Dalam pengelolaan keuangan, unit kerja kami telah menggunakan sistem</p>

	<p>yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan informasi. (Intihanah1 et al., 2020)</p>	<p>2) Efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan berbasis TI</p> <p>3) Keamanan dan keandalan sistem.</p> <p>4) Aksesibilitas</p>	<p>akuntansi digital yang terintegrasi.</p> <p>2.1) Dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat waktu.</p> <p>2.2) Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah serta mempercepat dalam proses pengolahan data transaksi keuangan.</p> <p>3) Sistem teknologi informasi yang digunakan memastikan integritas dan keakuratan data keuangan pemerintah.</p> <p>4) Teknologi informasi mempermudah pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	---

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran dilakukan dengan modifikasi skala likert menggunakan lima alternatif jawaban sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Untuk menguji validitas dan keandalan dari kuesioner, maka dilakukan pengujian instrumen penelitian yaitu:

1. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui validasi atau kesesuaian dari kuesioner penelitian. Ketentuan pada uji validitas adalah semakin tinggi nilai kevalidan kuesioner maka semakin menunjukkan kesesuaian data yang diukur.

Kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai ($r_{hitung} > r_{tabel}$) dan sebaliknya apabila ($r_{hitung} < r_{tabel}$) maka kuesioner dinyatakan tidak valid ([Sugiyono, 2017](#)).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui reliabel (andal) atau tidak data kuesioner. Uji ini digunakan untuk melihat apakah data kuesioner konsisten, akurat atau tidak sehingga dapat menunjukkan hasil bahwa pengukuran terbebas dari kesalahan atau error.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebagai persyaratan analisis regresi memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk mengukur variabel yang digunakan. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov (Uji K- S).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model. Nilai yang menunjukkan multikolinierietas adalah nilai $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,01$ dan tidak terjadi multikolinieritas (Sugiyono, 2017).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam sebuah penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel

dependen (Y), dengan persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi masing - masing variabel

ε = Error (residual)

3.6.3.1 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dalam sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur apakah model regresi yang digunakan layak secara statistik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji kelayakan model ini dilakukan melalui:

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan suatu model penelitian dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika signifikansi $< 0,05$, maka model regresi layak digunakan, jika signifikansi $> 0,05$, maka model regresi tidak layak.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya presentase variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (X_1, X_2, X_3). Jika Nilai $R^2 = 0$, maka dapat disimpulkan tidak ada presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $R^2=1$, maka presentase pengaruh yang diberikan tinggi.

3.6.3.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji F).

1. Uji statistik (uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dipakai dalam model yaitu standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh atau tidak pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner dengan sampel pegawai bagian akuntansi dan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Kuesioner didistribusikan secara *online* memanfaatkan google form dengan rentang waktu pengisian dari tanggal 5 Juni sampai 26 Juni 2025.

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 150 responden, Berikut merupakan hasil dari pengumpulan data.

Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Frekuensi
Kuesioner seluruhnya disebar	150
Kuesioner tidak kembali	14
Kuesioner tidak sesuai kualifikasi	16
Kuesioner dapat diolah	120

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kuesioner keseluruhan yang disebar sebanyak 150, terdapat 14 kuesioner yang tidak kembali serta 16 kuesioner tidak sesuai kualifikasi. Oleh karena itu kuesioner seluruhnya yang dapat diolah adalah 120 kuesioner.

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki – Laki	40	33,3%
Perempuan	80	66,7%
Total	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki – laki sebanyak 40 orang atau 33,3% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 80 orang atau 66,7%. Sehingga sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
< 25 Tahun	0	0%
26 – 35 Tahun	75	62,5%
36 – 45 Tahun	34	28,3%
>45 Tahun	11	9,2%
Total	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan usia kurang dari 25 tahun tidak ada atau nol, usia 26-35 tahun 62,5%, usia 36-45 tahun

28,3% dan lebih dari 45 tahun 9,2% . Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar dengan usia 26-35 tahun.

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMA/ SMK	1	0,8%
D III	21	17,5%
S1	92	76,7%
S2/ S3	6	5%
Total	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 92 orang dengan presentase 76,7%, kemudian latar Pendidikan SMA/SMK 1 orang dengan persentase 0,8%, DIII sebanyak 21 orang dengan persentase 17,5% dan S2/S3 sebanyak 6 orang dengan presentase 5%. Sehingga sebagian responden dalam penelitian ini berlatar pendidikan S1.

4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Data responden berdasarkan jabatan dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.5

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Sub Bagian Keuangan	17	14,1%
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2	1,7%
Staf Penyusun laporan Keuangan	62	51,7%
Verifikator Keuangan	6	5%
Staf Bidang Akuntansi	10	8,3%
Staf Bidang Keuangan	12	10%
Pengelola Keuangan	2	1,7%
Bendahara	9	7,5%
Total	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.5, responden dengan jabatan Kepala Sub bagian Keuangan sebanyak 17 orang dengan persentase 14,1%, jabatan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 2 orang dengan persentase 1,7%, jabatan Staf Penyusun Laporan Keuangan sebanyak 62 orang dengan persentase 51,7%, jabatan Verifikator Keuangan sebanyak 6 orang dengan persentase 5%, jabatan Staf Bidang Akuntansi sebanyak 10 orang dengan persentase 8,3%, jabatan Staf Bidang Keuangan sebanyak 12 orang dengan persentase 10%, jabatan Pengelola Keuangan sebanyak 2 orang dengan persentase 1,7%, jabatan Bendahara sebanyak 9 orang dengan persentase 7,5%. Sehingga sebagian besar responden pada penelitian ini memiliki jabatan sebagai Staf Penyusun Laporan Keuangan.

4.2 Deskripsi Variabel

Tanggapan responden terhadap setiap variabel pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert, dimana skala ini memungkinkan untuk mengubah data

kualitatif berupa persetujuan atau ketidaksetujuan menjadi data kuantitatif berbentuk angka sehingga dapat diolah secara statistik. Melalui skala ini, peneliti dapat mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap setiap butir pernyataan masing-masing variabel penelitian. Adapun skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju = 5

Setuju = 4

Netral = 3

Tidak Setuju = 2

Sangat Tidak Setuju = 1

Dalam penelitian ini untuk mengukur rentang skala responden menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RS = \frac{m-n}{k}$$

$$RS = \frac{5-n}{k}$$

1.33

Sumber: Ghazali, 2018

Keterangan :

RS = Rentang Skala

m = Skor Maksimal

k = Skor Minimal

n = Jumlah Kategori

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas, indeks yang diperoleh dari data responden dikelompokkan menjadi tiga kategori yang didasarkan pada rentang nilai indeks sebesar 1,33.

1. Indeks 1-2,33: Kategori ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengukuran variabel penelitian yang rendah, dimana responden cenderung tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan.
2. Indeks 2,33-3,67: Kategori ini mengidentifikasi bahwa tingkat pengukuran variabel penelitian sedang atau cukup. Responden pada kategori ini memiliki pendapat netral atau cenderung setuju, tetapi tidak terlalu kuat.
3. Indeks 3,68-5: Kategori ini merupakan rentang nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengukuran variabel penelitian tinggi/baik. Yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan.

4.2.1 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Tabel 4. 6 Tanggapan Responden pada Variabel SAP

No	Indikator	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Penerapan SAP	0	0	7	61	52	4,38	Tinggi
2	Kepatuhan terhadap PSAP	0	0	0	56	64	4,53	Tinggi
3	Pemahaman terhadap SAP	0	20	45	183	112	4,08	Tinggi
Nilai rata –rata							4,33	Tinggi

Sumber :Data Output SPSS 25, 2025

Hasil pengolahan data kuesioner pada 120 responden, diperoleh nilai rata – rata pada variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 4,33. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai rentang skala indeks tinggi, yang mengidentifikasikan persepsi baik terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan.

4.2.2 Deskripsi Variabel *Good Governance* (X2)

Hasil olah data jawaban responden pada variabel *Good Governance* dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Pada Variabel *Good Governance*

No	Indikator	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Transparansi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah	0	7	19	60	33	3,96	Tinggi
2	Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan	0	1	13	125	100	4,36	Tinggi
3	Penegakkan Hukum	0	2	10	66	41	4,19	Tinggi
4	Partisipasi public dalam proses penganggaran dan pelaporan	1	8	34	140	58	4,04	Tinggi
Nilai rata –rata							4,14	Tinggi

Sumber :Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada 120 responden, diperoleh nilai rata – rata pada variabel *good governance* sebesar 4,14. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai rentang skala indeks tinggi, yang mengidentifikasikan persepsi baik terhadap penerapan *good governance*.

4.2.3 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Hasil olah data jawaban responden pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Pada Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Indikator	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah (misalnya: SIMDA, SIPD)	0	4	8	67	41	4,21	Tinggi
2	Efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan berbasis TI	1	0	8	89	141	4,53	Tinggi
3	Keamanan dan keandalan sistem	0	0	7	40	73	4,55	Tinggi
4	Aksesibilitas	0	1	8	40	71	4,51	Tinggi
Nilai rata – rata							4,45	Tinggi

Sumber :Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada 120 responden, diperoleh nilai rata – rata pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4,45. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai rentang skala indeks tinggi, yang mengidentifikasikan persepsi baik terhadap penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah kabupaten brebes.

4.2.4 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berikut ini adalah hasil pengolahan data jawaban responden pada variabel kualitas laporan keuangan.

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Relevansi laporan keuangan	0	0	3	75	43	4,37	Tinggi
2	Keandalan laporan keuangan	0	1	8	144	87	4,32	Tinggi
3	Dapat dipahami	0	0	11	140	90	4,35	Tinggi
4	Dapat dibandingkan	0	0	5	73	43	4,35	Tinggi
Nilai rata –rata							4,35	Tinggi

Sumber :Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil pengolahan data kuesioner pada 120 responden, diperoleh nilai rata –rata pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4,35. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai rentang skala indeks tinggi, yang mengidentifikasikan persepsi baik terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3 Statistik Deskriptif

Dengan statistik deskriptif menunjukkan hasil nilai rata-rata (*mean*), seberapa jauh data menyebar dari rata-rata (standar deviasi), serta nilai maksimum

dan minimum. Adapun statistik deskriptif dari analisis data ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	120	14,00	25,00	21,0333	2,71297
GG	120	20,00	35,00	28,9833	3,86969
PTI	120	15,00	25,00	21,3583	2,43502
KLK	120	18,00	30,00	25,7833	2,88486
Valid N (listwise)	120				

Sumber :Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa jumlah responden atau n yang menjawab pertanyaan setiap variabel sebanyak 120 orang. Di bawah ini adalah penjelasan secara rinci terkait informasi yang tercantum pada tabel 4.10.

1. Hasil pengukuran pada variabel standar akuntansi pemerintahan, nilai terendah adalah 14, nilai tertinggi 25 dan rata – rata 21,0333. Dengan standar deviasi sebesar 2,71297.
2. Hasil pengukuran pada variabel *good governance*, nilai terendah adalah 20, nilai tertinggi 35 dan rata – rata 28,9833. Dengan standar deviasi sebesar 3,86969.
3. Hasil pengukuran pada variabel pemanfaatan teknologi informasi, nilai terendah adalah 15, nilai tertinggi 25 dan rata – rata 21,3583. Dengan standar deviasi sebesar 2,43502.

4. Hasil pengukuran pada variabel kualitas laporan keuangan, nilai terendah adalah 18, nilai tertinggi 30 dan rata – rata 25,7833. Dengan standar deviasi sebesar 2,88486.

4.4 Analisis Instrumen

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan apakah item pernyataan dapat menjelaskan indikator setiap variabel penelitian. Item pernyataan dikatakan valid secara statistik apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka item pernyataan dianggap tidak valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1	0,00	Valid
	2	0,00	Valid
	3	0,00	Valid
	4	0,00	Valid
	5	0,00	Valid
Good Governance	1	0,00	Valid
	2	0,00	Valid
	3	0,00	Valid
	4	0,00	Valid
	5	0,00	Valid
	6	0,00	Valid
	7	0,00	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	0,00	Valid
	2	0,00	Valid
	3	0,00	Valid
	4	0,00	Valid
	5	0,00	Valid

Kualitas Laporan Keuangan	1	0,00	Valid
	2	0,00	Valid
	3	0,00	Valid
	4	0,00	Valid
	5	0,00	Valid
	6	0,00	Valid

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan Analisis data pada Tabel 4.11 menginterpretasikan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan valid.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur jawaban responden terhadap pernyataan pada kuesioner apakah hasilnya konsisten. Hasil uji reliabilitas kuesioner data ini pada tabel berikut.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,784	Reliabel
2	Good Governance	0,865	Reliabel
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,836	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan	0,830	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yaitu standar akuntansi pemerintahan, good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai Cronbach

Alpha diatas ambang batas 0,60. Dengan rincian, variabel standar akuntansi pemerintahan menunjukkan hasil nilai Cronbach Alpha $0,784 > 0,60$, variabel good governance menunjukkan nilai Cronbach Alpha $0,865 > 0,60$, variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai Cronbach Alpha $0,836 > 0,60$, dan variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil nilai Cronbach Alpha $0,830 > 0,60$, dari hasil tersebut mengidentifikasi bahwa seluruh item pernyataan pada setiap variabel konsisten, dengan demikian variabel – variabel tersebut dinyatakan reliabel dan layak serta dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5 Asumsi Klasik

Pengujian asumsi – asumsi klasik pada penelitian ini meliputi :

1. Tidak adanya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan sebelumnya.
2. Tidak adanya korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebas.
3. Distribusi residual yang mengikuti distribusi normal.

4.5.1. Uji Normalitas

Dilakukan untuk memastikan data yang digunakan memiliki pola distribusi normal. Salah satunya dengan uji Kolmogorov – Smirnov, uji ini akan memberikan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka menunjukkan bahwa tersebut tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal, yang artinya data dianggap normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data menunjukkan berdistribusi tidak normal. Berikut hasil uji normalitas Kolmogorov – Smirnov.

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	1,91023371
	Absolute	0,57
	Positive	0,57
	Negative	-0,052
Test Statistic		0,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{cd}

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200, Dimana $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolienaritas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linier antar variabel bebas dalam sebuah model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *VIF*. Jika nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai *VIF* lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai kedua statistik tersebut berada dalam rentang yang dapat diterima, maka model regresi dapat dianggap valid. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Standar akuntansi pemerintahan	0,528	1,894	Tidak terjadi multikolinearitas
Good governance	0,356	2,812	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,410	2,439	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya multikolinearitas yang signifikan. Nilai VIF terbesar 2,812 dan nilai *tolerance* terkecil adalah 0,356 masih dalam rentang yang dapat diterima yaitu $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$, dengan demikian model regresi yang dihasilkan dianggap valid dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah varians dari residual dalam regresi konsisten atau tidak. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak ada gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Standar akuntansi pemerintahan	0,542	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Good governance	0,172	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,717	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada semua variabel. Nilai signifikansi yang diperoleh masing – masing variabel yaitu standar akuntansi pemerintahan menunjukkan nilai 0,542, variabel good governance menunjukkan nilai 0,172 dan variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai 0,717 yang artinya hal ini mengidentifikasi bahwa varian dari residual dalam model regresi bersifat konstan tidak dipengaruhi oleh variabel dependen.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel besar dan terikat juga untuk memprediksi seberapa besar pengaruh antar variabel. Hasil olah data berdasarkan analisis regresi sebagai berikut.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi linier Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,299	1,658		3,799	0,000
	X1	0,224	0,090	0,210	2,485	0,014
	X2	0,233	0,077	0,312	3,030	0,003
	X3	0,376	0,114	0,317	3,305	0,001

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 6,299 + 0,224X_1 + 0,233X_2 + 0,376X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independent

X_1 = *Payment gateway*

X_2 = *Locus of control*

e = Standard Error

Hasil persamaan tersebut dapat diidentifikasi pada penjelasan di bawah ini:

1. Koefisien konstanta 6,299 menunjukkan bahwa apabila standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi tidak diperhitungkan atau dianggap nol, maka kualitas laporan keuangan secara dasar akan berada pada level 6,299.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) dengan kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan 1% pada variabel standar akuntansi pemerintahan maka akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,224.
3. Analisis regresi menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan

antara *good governance* (X2) dengan kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan 1% pada variabel *good governance* maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,233.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi (X3) dengan kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan 1% pada variabel pemanfaatan teknologi informasi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,376.

4.7 Hasil Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur apakah model regresi yang digunakan layak secara statistik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

4.7.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen benar – benar mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji F < 0,05 artinya pengaruh variabel independen dapat dikatakan signifikan. Sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka pengaruhnya tidak signifikan.

**Tabel 4. 17 Hasil uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	556,137	3	185,379	49,522	.000 ^b
	Residual	434,230	116	3,743		
	Total	990,367	119			

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari ambang batas 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen signifikan secara statistik, sehingga dianggap valid.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 ^a	0,562	0,550	1,93478

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Dari tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square adalah 0,550 yang artinya bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan sekitar 55% dari variabilitas kualitas laporan keuangan. Artinya factor lain mempunyai kontribusi sebesar 45% terhadap kualitas laporan keuangan.

4.8 Uji Hipotesis (Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 19 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,299	1,658		3,799	0,000
	X1	0,224	0,090	0,210	2,485	0,014
	X2	0,233	0,077	0,312	3,030	0,003
	X3	0,376	0,114	0,317	3,305	0,001

Sumber : Data Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

1. Variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) dengan hasil nilai signifikansi $0,014 < \text{dari } 0,05$. Artinya H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
2. Variabel *good governance* (X2) dengan hasil nilai signifikansi $0,003 < \text{dari } 0,05$. Artinya H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) dengan hasil nilai signifikansi $0,01 < \text{dari } 0,05$. Artinya H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

Penjelasan intensif terhadap temuan penelitian merupakan upaya guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

4.9.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara langsung memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Brebes dibuktikan dengan hasil uji statistik yaitu nilai signifikansi $0,014 < \text{dari } 0,05$. Artinya semakin mematuhi aturan standar akuntansi pemerintahan dalam pembuatan laporan maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Shinta et al., 2020).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maydiyanti et al., 2020) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, karena suatu pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Sesuai relevansi teori agensi yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai agen yang diberikan kewenangan oleh principal yaitu masyarakat diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintahan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

4.9.2 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good governance menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahana agar tercipta pemerintahan yang efesien dan efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan relevansi teori agensi dimana teori tersebut mendorong keterkaitan antara goog governance dan kualitas laporan keuangan , dimana masyarakat berperan sebagai principal dan pemerintah sebagai agen.

Berdasarkan hasil uji statistik, penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Instansi menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan anggaran sehingga laporan keuangan yang disajikan bersifat netral.

Semakin baik *good governance* maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani & Zulaika, 2023) yang menyatakan bahwa semakin baik tingkat *good governance*, maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

4.9.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki tingkat signifikansi $0,01 < 0,05$ yang artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luthfya et al., 2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi agar kemampuan dalam pengelolaan keuangan meningkat, sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang terus meningkat. Hal ini sesuai dengan relevansi teori agensi yang mendorong adanya keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan, dimana Masyarakat yang berperan sebagai principal dan pemerintah sebagai agen.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hal ini sesuai dengan relevansi teori yang digunakan yaitu teori keagenan dimana teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen yang diberikan kewenangan oleh masyarakat sebagai principal untuk membuat suatu Keputusan dalam pengelolaan keuangan.
2. *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa semakin baik good governance maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin teknologi informasi digunakan dalam suatu pemerintahan, maka kualitas laporan

keuangan semakin baik, dikarenakan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat yang berperan sebagai agen untuk mengetahui pengelolaan keuangan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Brebes, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, antara lain :

1. Peningkatan Kompetensi SDM

Diperlukan adanya kebijakan yang mengatur terkait pelatihan rutin bagi pegawai khususnya yang menangani bidang keuangan untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP).

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Perlu adanya penguatan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui pengawasan internal yang lebih ketat yaitu dengan memperkuat kebijakan yang sudah ada.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Diperlukan adanya kebijakan yang mengatur tentang pengadaan dan pengembangan terkait system informasi akuntansi yang terintegrasi sehingga akan memudahkan pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang penyusunan laporan keuangan yang lebih

optimal sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal – hal sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu pengumpulan data yang relatif singkat, sehingga jawaban responden dapat dipengaruhi oleh kondisi atau beban pekerjaan pada saat pengisian kuesioner.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas, hanya menggunakan tiga variabel yaitu standar akuntansi pemerintahan, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mempertimbangan faktor lain seperti kompetensi aparatur daerah atau system pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan dengan memanfaatkan google form, sehingga peneliti tidak dapat menggali informasi melalui observasi atau wawancara secara langsung.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil topik penelitian yang lebih luas dan meningkatkan metodologi penelitian yang akan digunakan khususnya apabila menggunakan data primer, maka sebaiknya dilakukan survey secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada responden sehingga diperoleh data yang lebih valid.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah jumlah responden tidak hanya pada bagian keuangan dan akuntansi, sehingga hasil penelitian lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Advia, R., Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8552>
- Akademia.co.id. (2024). *Memahami data primer dalam penelitian*. <https://akademia.co.id/memahami-data-primer-dalam-penelitian/>
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Ariyanti, D. O., Ningsih, W. F., & Rakhmawati, R. (2023). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Referensi Ilmu UNARS (SIFEBRI'S)*, 1(1), 108–125.
- Buchori, W. P. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 15(3), 41–53. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i3.643>
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkulu. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2, 77–105. <https://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/jas/article/view/132>
- Eki, R. N., & Hartawati, S. I. (2020). Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Economic Resource*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.397>
- Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5, 12–16.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=94043http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Junyantara, I. G. A., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 338–358. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1820>
- Khadijah, Juniarti, I. (2025). Mewujudkan Goog Governance melalui penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 18–26.
- Lantip, P. D. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*.

- Luthfya, A., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). The Effect of Implementing Government Accounting Standards, Internal Control Systems and The Use of Information Technology on The Quality of Financial Reports in Jambi Province Regional Government Organizations With Organizational Commitment As a Moderati. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, Vol.9*(1), 12–25. <https://doi.org/10.22437/jaku.v9i1.30533>
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 10*(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Mirawati, M., Nirwana, E., & Hendarsyah, D. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 4*(1), 31–44. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73>
- Munawir, S. (1991). *Analisis Laporan Keuangan* (keempat).
- Nur Setyarini, A., & Ambarwati, S. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaat Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jiap, 4*(1), 2774–9517.
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 10*(1), 55. <https://doi.org/10.36982>
- Pravasanti. Y.A, Ningsih, S. (2016). Pengaruh Kualitas APAratur Daerah, Sistem AKuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal AKTSAR, 2*, 199–214.
- Presiden, R. I. (2010). *tentang standar akuntansi pemerintahan. Republik Indonesia*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumbe Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY. *Jurnal Nominal, 6*.
- Purba, S., & Purba, R. (2023). Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti, 10*(1), 137–152. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15264>
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11*(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093>
- Rahmadani, P. D., & Zulaika, N. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2*(1), 163–170.
- RI, L. A. N. (2004). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner, 6*(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Shinta, I., Sri, P., Sriyono, S., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Journal Of Islamic Accounting Research, 2*(1),

17–35.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- SUMARYATI, A., NOVITASARI, E. P., & MACHMUDDAH, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795>
- Tabupook, A.A, W. I. (2024). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3).
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1624>
- UNDP, C. (1997). *good governance*. Management and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support.
- Uno, H. H. B., & Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi Kominikasi dan Informasi dalam Dunia Pembelajaran*. Bumi Aksara.

